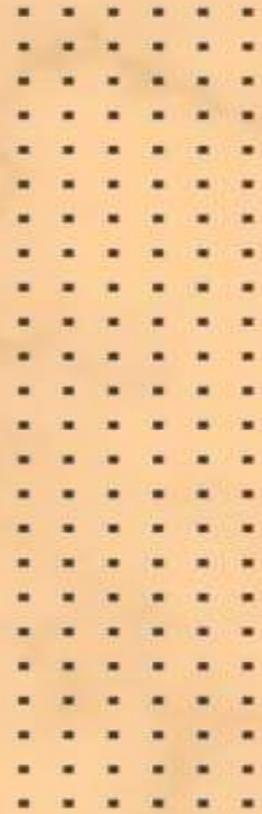


Renstra Perubahan



**DINAS
SOSIAL**



KOTA BOGOR

2019 - 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap perangkat daerah yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Sosial Kota Bogor wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan perangkat daerah yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD.

Renstra Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2020-2024 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen perencanaan terkait seperti Renstra Kementerian Sosial RI, dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo.

5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan.
7. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
8. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
9. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Psikotropika.
10. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1979 tentang Narkotika.
11. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
12. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
13. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 53 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial.
26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2019-2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020-2024 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang berpedoman pada Misi ke dua mewujudkan Kota Bogor yang cerdas dan misi tiga yakni mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020-2024 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas secara terpadu, terarah, dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sebagai instrument untuk memenuhi secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unit kerja Dinas Sosial dan *stakeholder* terkait dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan;
3. Sebagai instrument untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020 – 2024 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam pasal 111 Permendagri No. 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rencana Startegi Kementrian
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran**
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- BAB VIII Penutup**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Kota Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Tugas dan fungsi Dinas Sosial telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 104 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial. Adapun tugas Dinas Sosial Kota Bogor adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial Kota Bogor menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial;
4. Pelaksanaan teknis operasional di bidang sosial;
5. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.



Gambar 1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bogor

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Bogor (Gambar 1) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bogor.

2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KOTA BOGOR

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bogor didukung oleh total 44 orang pegawai.

TABEL 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan

Klasifikasi	Jumlah
A. Jenis Kelamin	
1. Laki-Laki	28
2. Perempuan	16
B. Pendidikan	
1. SD	-
2. SMP	-
3. SMA	7
4. D1 - D3	4
5. D4	1
6. S1	19
7. S2	13
C. Golongan	
1. IV/c	2
2. IV/b	2
3. IV/a	6
4. III/d	5
5. III/c	3
6. III/b	9
7. III/a	9
8. II/d	5
9. II/c	1
10. II/b	-
11. I/b	-

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas fungsi Dinas Sosial Kota Bogor tersebut, terdapat pula sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Sosial dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

TABEL 2.1 (Tc-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri		100	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bogor	55	57	59	61	63	NA	223.000.000	230.000.000	300.000.000	396.000.000	NA	97.25	98.22	99.92	98.00
2	Prosentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		100	Meningkatnya Peran Serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	NA	994.000.000	1.012.000.000	1.000.9000.000	1.023.000.000	NA	98.46	96.00	97.19	96.00

TABEL 2.2 (Tc.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor
Tahun 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.090.000.000	1.562.000.000	1.500.000.000	2.085.000.000	1.112.052.500	937.302.850	1.529.822.433	2.420.299.063	1.830.091.554	578.206.890	86	98	92	88	52	11	-17
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	490.000.000	500.000.000	1.122.697.000	815.625.000	524.000.000	419.874.400	450.000.000	774.674.050	791.471.100	294.282.000	86	90	70	97	57	56	
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidan, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial lainnya).	350.000.000	400.000.000	450.000.000	275.000.000	107.510.000	142.727.000	380.681.500	441.803.500	239.706.500	58.187.000	41	95	98	87	54	-18	-3
Pembinaan Anak Terlantar	380.000.000	370.000.000	75.000.000	25.000.000	3.200.000	200.000.000	349.390.400	73.045.000	21.781.400	328.000	98	94	97	87	10	-59	-165
Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma	203.000.000	300.000.000	200.000.000	150.000.000	38.200.000	200.000.700	259.092.500	177.865.370	145.791.900	12.960.000	98	86	89	97	34	-21	-19

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo	100,000,000	150,000,000	177,500,000	50,000,000	5,700,000	80,800,000	147,908.650	170,920.087	44,685,000	5,300,000	80	99	96	89	93	-23	23
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	800,000,000	1.100.000.000	750,000,000	350,000,000	186,489,500	680,000,000	1.076.337.500	665.743.772	338.461.216	82.532.500	85	98	89	97	44	-24	-5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	465,859,560	729.634.580	414,690,724	750,000,000	2.184.695.994	460,000,000	670.820.116	247.165.047	661.640,000	1.463.970.061	97	92	60	88	67	71	12
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	684,840,000	1.793.305.668	1,491,420,000	1,650,000,000	710,433,510	670,000,600	1.740.998.978	1.328.347.386	1.526.772.750	405.387.800	97	97	89	93	57	25	8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	10,695,000	35,600,100	49,877,000	44,497,500	34,270,000	4,345,000	75	100	89	69	41	-20	-3
Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,891,000	NA	8,315,000	20,000,000	13,240,600	4,891,000	0	42	100	66	100		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	74,000,000	50,000,000	-	-	-	67,407,000	23,972,000	-	-	-	91	48	32	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya sehingga membutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif. Tantangan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan pembangunan.
2. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah.
3. Krisis ekonomi yang berdampak pada kegiatan ekonomi dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin.
4. Dunia usaha yang kurang memberi peluang bagi tenaga kerja dari PMKS yang telah diberdayakan.
5. Menguatnya primordialisme berbasis etnis, golongan, aliran, agama yang dapat berujung pada konflik sosial.
6. Belum optimalnya koordinasi dan kemitraan strategis dalam rangka mendorong percepatan penanganan PMKS.
7. Cukup tingginya frekuensi kejadian bencana.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha.
2. Standar Pelayanan Minimal sebagai instrument untuk mendorong percepatan pencapaian kesejahteraan sosial.
3. Adanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Dukungan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam penanganan PMKS.
5. Kerjasama antara *stakeholder* untuk melakukan terobosan penanganan PMKS yang terarah, komprehensif, dan berkelanjutan.

2.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat 5 (lima) jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Lima jenis Pelayanan Dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Adapun rincian Capaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

No	Pelayanan Dasar	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	NA	NA	87,56%	22%	17,52%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	NA	NA	100%	18,05%	36,70%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	NA	NA	100%	31,94%	32,36%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	NA	NA	100%	21,53%	55,72%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	NA	NA	96,10%	100%	100%	100%

Adapun penjelasan capaian pelayanan dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

Tahun 2017, Penyandang disabilitas yang terlantar sebanyak 193 orang, dan dari jumlah tersebut 169 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (87,56%). Tahun 2018, Penyandang disabilitas

yang terlantar sebanyak 970 orang, dan dari jumlah tersebut 212 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (22%). Tahun 2019, Penyandang disabilitas yang terlantar sebanyak 1.010 orang, dan dari jumlah tersebut 177 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (17,25%). Tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas terlantar teridentifikasi pada tahun 2020 sebanyak 75 orang, dan semuanya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti.

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

Tahun 2017 terdapat anak terlantar sebanyak 131 orang, seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Pada tahun 2018 terdapat anak terlantar sebanyak 288 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 52 orang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses pengangkatan 8 anak / adopsi. Tetapi dalam hal ini 5 anak belum selesai untuk prosesnya (masih dalam tahap persidangan). Dengan begitu capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 18,05%. Tahun 2019 terdapat 395 orang anak terlantar, dan 145 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (36,70%). Tahun 2020 terdapat anak terlantar sebanyak 61 orang, seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

Pada tahun 2017 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 150 orang, dan seluruhnya mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Tahun 2018 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 313 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 100 orang (31,94%). Pada tahun 2019, dari 309 orang lanjut usia terlantar di luar panti, 100 orang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti (32,36%). Pada tahun 2020 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 46 orang, dan seluruhnya mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Selama tahun 2017 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 233 orang, dan seluruhnya telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Pada tahun 2018 terdapat tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 195 orang, dan yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 42 orang (21,53%). Tahun 2019 ada 201 orang tuna sosial gelandangan dan pengemis, dan sebanyak 112 orang mendapatkan rehabilitasi (55,72%). Tahun 2020 terdapat tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 86 orang, seluruhnya telah dibina berupa assessment awal.

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Tahun 2017 terdapat 7000 orang korban bencana, dan 6727 orang diantaranya (96,10%) telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Tahun 2018 terdapat 7.029 orang korban bencana, tahun 2019 terdapat 3.523 orang, dan tahun 2020 jumlah korban bencana alam sebanyak 1.040 orang, seluruhnya terpenuhi kebutuhan dasarnya.

2.6. Realisasi Penyerapan Anggaran

Tabel 6.1 Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PASU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Presentase Anak Terlantar yang Ditangani	19,48%	Rp. 3,200,000	Rp. 3,200,000	100%
	Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dibina dan Terlayani	73 Orang	Rp. 3,200,000	Rp. 3,200,000	100%
		Jumlah anak yang di adopsi	10 Orang			
2	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina	92,98%	Rp. 5,700,000	Rp. 5,300,000	92,98%
	Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi	92,98%				
	Pembinaan Yayasan Sosial / Orsos / Panti Asuhan	1. Terlaksananya Pembinaan Bagi Yayasan Sosial / Orsos. / Panti Sosial 2. Sosialisasi Akreditasi Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial	83 Yayasan 78 Peserta	Rp. 5,700,000	Rp. 5,300,000	92,98%
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Presentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	100%	Rp. 38,200,000	Rp.	0
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Disabilitas	Terlaksananya Bimbingan bagi Para Disabilitas	75 Orang	Rp. 38,200,000	Rp.	0
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Presentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	85%	Rp. 3,050,000	Rp. 2,500,000	81,97%
	Penyediaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang KIP	Presentasi Pelayanan Publik yang Berbasis Sistem Informasi	88	Rp. 3,050,000	Rp. 2,500,000	81,97%
5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Mimman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	8%	Rp. 107,510,000	Rp. 106,845,000	99,38%
	Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah	Terlayannya PMKS dan orang terlantar di rumah singgah	100Orang	Rp. 107,510,000	Rp. 106,845,000	99,38%
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase keluarga miskin yang tergradiasi	98%	Rp. 1,112,052,500	Rp. 1,083,316,989	

	Pemutakhiran Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dimutakhirkan	99,94%	Rp 572,046,000	Rp 571,701,400	99,94%
	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)	1. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT secara akurat 2. Pelatihan Pengisian Data Prelist BDT dan Penginputan Hasil Verval PBI JKN pada Aplikasi SIKS-NG Non PNS dan Kepala Seksi Kemasyarakatan.	2 Kegiatan 74 Peserta 68 Peserta	Rp 44,868,000	Rp 44,778,000	99,80%
	Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Terfasilitasinya Orang Terlantar dalam Perjalanan untuk kembali ke Daerah Asal	360 Orang	Rp 113,675,000	Rp 112,927,900	99,34%
	Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia)	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Ditangani	100 Orang	Rp 26,950,000	Rp 26,950,000	100%
	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	1. Terlaksananya bimbingan Pemantapan Pendamping dan Pengelola KUBE 2. Terlaksananya Validasi data WRSE 3. Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Sosial Barang bagi WRSE	77 Orang 50 Orang 50 Orang	Rp 46,608,500	Rp 46,143,290	99%
	Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan PKH	1. Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin yang Harus	17.039 RTSM	Rp 17,700,000	Rp 15,429,800	87,17%
	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Tertanganinya Korban Bencana Dalam Kebutuhan Pemenuhan Dasar	2000 jiwa	Rp 143,385,000	Rp 143,259,100	99,91%
	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	1. Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan WTS yang Ditangani 2. Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial	85 Orang 75 Orang	Rp 116,605,000	Rp 100,162,500	85,90%
	Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai	Terlaksananya Rapat Tikor Tingkat Kota Bogor, Terlaksananya Rakor Evaluasi BPNT, dan Laporan Hasil Kegiatan	1 Kali 2 Kali 5 Buku	Rp 30,215,000	Rp 21,964,999	72,70%
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	Rp 186,489,500	Rp 184,637,136	
		Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif				
	Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	100%	Rp 12,990,000	Rp 12,950,000	99,69%
	Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat	Meningkatnya Jumlah PSKS yang dibantu dan terbina	100%	Rp 110,330,000	Rp 110,176,000	99,86%

	Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial	Terlaksanannya Pembinaan Untuk PSKS lain. Kemitraan Dunia Usaha dan Penyuluh Kesejahteraan Sosial	100%	Rp 27,119,000	Rp 25,460,636	93,88%
	Pemeliharaan TMP Dreded	Fasilitasi Pemeliharaan TMP Dreded dan Revitalisasi TMP Dreded	1061 Macam 1 TMP	Rp 36,050,500	Rp 36,050,500	100%
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)	90%	Rp 4,891,000	Rp 4,891,000	100%
	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)	Jumlah Verifikasi Usulan Hibah / Bansos Jumlah Monitoring Penyaluran Hibah / bansos	5 Proposal 4 Proposal	Rp 4,891,000	Rp 4,891,000	100%
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90%	Rp 10,695,000	Rp 8,695,000	81,30%
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	8 Dokum en, 20 Orang	Rp 10,695,000	Rp 8,695,000	81,30%
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	80%	Rp 710,433,510		
	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Sosial	100%	Rp 351,582,010	Rp 347,274,200	98,77%
	Pengadaan Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	100%	Rp 358,851,500	Rp 346,223,400	96,48%
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya/terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial	100%	Rp 2,184,695,994	Rp 2,075,959,335	95,02%
	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Terfasilitasi dan tersedianya Saranan dan Prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 2,184,695,994	Rp 2,075,959,335	95,02%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	100%	Rp 7,227,058,121	Rp 7,116,300,269	98,47%
	Belanja Gaji dan Tunjangan	Persentase Pemenuhan gaji	100%	Rp 7,227,058,121	Rp 7,116,300,269	98,47%

Tabel 6.1 Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN 2020	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Prosentase Anak Terlantar yang Ditangani	19,48%	Rp 74,235,000	Rp 15,066,800	20%
	Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dibina dan Terlayanani	75 Orang	Rp 74,235,000	Rp 15,066,800	20%
		Jumlah anak yang di adopsi	10 Orang			
2	Program Pembinaan Pantu Asuhan / Pantu Jompo	Persentase pantu asuhan / yayasan yang dibina	100%	Rp 10.135,000	Rp - 0	
		Persentase Pantu Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi				
	Pembinaan Yayasan Sosial / Orsos / Pantu Asuhan	Terlaksananya Pembinaan Bagi Yayasan Sosial / Orsos/ Pantu Sosial, Sosialisasi Akreditasi Yayasan Sosial/Orsos/Pantu Sosial	83 Yayasan 78 Peserta	Rp 10,135,000	Rp - 0	
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	29,58%	Rp 74,934,800		
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Disabilitas	Terlaksananya Bimbingan bagi Para Disabilitas	75 Orang	Rp 36,930,800	Rp 36,930,800	100%
	Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking	Prosentase jumlah Kasus yang diintervensi	100%	Rp 38,004,000	Rp 1,014,000	2,67%
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh	100%	Rp 3,040,000	Rp - 0	0%
	Penyediaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang KIP	Prosentasi Pelayanan Publik yang Berbasis Sistem Informasi	100%	Rp 3,040,000	Rp - 0	0%

	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Prosentase Anjal, Gepeng, dan WTS yang Direhabilitasi Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	21,41 % 8%	Rp 70.225,000		
					Rp 68,935,000	98,16%
	Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah	Terlayannya PMKS dan orang terlantar di rumah singgah	100 Orang	Rp 70.225,000		
					Rp 68,935,000	98,16%
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase keluarga miskin yang tergraduasi	98%	Rp 981,453,800		
6	Verifikasi dan Validasi BDT (Basis Data Terpadu)	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT, Pelatihan Pengisian Data Prelist BDT dan Pengimputan Hasil Verval BDT pada Aplikasi SIKS-NG Non PNS dan Kepala Seksi Kemasyarakatan	2 Kegiatan 74 Peserta 68 Peserta	Rp 351,618,600		
					Rp 337,928,090	97,68%
	Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Terfasilitasinya Orang Terlantar dalam Perjalanan untuk	360 Orang	Rp 50,125,000		
					Rp 50,125,000	100%
	Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia)	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang ditangani	100 Orang	Rp 44,493,000		
					Rp 25,382,400	65%
	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Pembinaan KUBE	Terlaksananya bimbingan Pemantapan, Pendampingan, dan Pengelola KUBE. Terlaksananya validasi data WRSE, Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Sosial Barang bagi WRSE.	77 Orang 50 Orang 50 Orang	Rp 74,639,000		
					Rp 50,000	

Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan PKH	Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang ditangani, Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial, Terlaksananya Rapat Tim Koordinasi PKH, Terlaksananya Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kompetensi Pendampingan Sosial	17.039 KSM 84 Orang 23 Orang 84 Orang	Rp 23,813,700		
				Rp 3,351,300	23,66%
Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Tertanganinya Korban Bencana dalam Kebutuhan Pemenuhan Dasar	2000 jiwa	Rp 289,378,000		
				Rp 186,786,000	70%
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Jumlah PMKS yang ditangani, Pelatihan	85 Orang	Rp 83,662,000		
				Rp 73,518,800	89,94%
Pembinaan Bagi Wanita Tuna Susila, Kelompok Minoritas, dan Eks Narapidana	Jumlah Kelompok Minoritas dan Eks Narapidana dibina	50 Orang	Rp 46,447,000		
				Rp -	0%
Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai	Terlaksananya Rapat Tikor Tingkat Kota Bogor, Terlaksananya Rakor Evaluasi BPNT, dan Laporan Hasil Kegiatan,	1 Kali 2 Kali 5 Buku	Rp 17,277,500		
				Rp 3,396,000	66,48%
7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	98%	Rp 841,091,400		
	Persentase partisipasi Selawan Penyuluh Sosial				
Penumbuhan Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Bogor	Jumlah Puskesmas yang terbentuk, Jumlah Anggota Puskesmas yang dibina, dan Sosialisasi Puskesmas	6 Puskesmas 16 Orang 90 Peserta	Rp 16,217,000		
				Rp 2,800,000	18%

Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat	Meningkatnya Jumlah PSKS yang dibantu dan terbina, Meningkatnya Jumlah PSKS yang dibantu, Terbentuknya UEP untuk PSKS, Terlaksananya Bimtek Karang Taruna, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, Terlaksananya Workshop PSKS, Terlaksananya Seleksi Pilar-Pilar Sosial Masyarakat.	100 PSKS 10 PSKS 2 UEP 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	Rp 140,938,000		
				Rp 23,480,600	20%
Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial	Kemitraan PSKS lain dari Dunia Usaha, Sosialisasi LKS dan Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Monitoring dan	100%	Rp 43,475,000		
				Rp 22,445,800	51,40%
Pemeliharaan TMP Dreded	Fasilitasi Pemeliharaan TMP Dreded dan Revitalisasi TMP Dreded	1061 Makam 1 TMP	Rp 618,864,000		
				Rp 31,152,500	86,33%
Peningkatan Kapasitas	Jumlah kasus yang	20	Rp 3,840,000	Rp -	0
8 Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Restorasi Sosial	Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Restorasi Sosial, Jumlah Peserta Sosialisasi	6 Kegiatan 180 Peserta	Rp 16,102,000		
				Rp -	0
Pembekalan Calon Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat	Penyuluh Sosial Masyarakat bersertifikat, bimbingan teknis Penyuluh Sosial Masyarakat, Sosialisasi di lokasi PPKS	5 Orang 25 Peserta 250 Peserta	Rp 1,655,400		
				Rp 1,655,400	100%

8	Program Pengembangan Data dan Informasi.	Prosentase Data dan Informasi Sesuai Kebutuhan Perencanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan	90%	Rp 10,892,000		Rp 10,892,000	100%
	Pengembangan Aplikasi PMKS dan PSKS	Updating Data PMKS dan PSKS yang Akurat, Terpeliharannya aplikasi PMKS dan PSKS	90% 1 Paket	Rp 10,892,000		Rp 10,892,000	100%
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)	90%	Rp 1,691,000		Rp - 0	
	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)	Jumlah Verifikasi Usulan Hibah / Bansos	5 Proposal	Rp 1,691,000		Rp - 0	
		Jumlah Monitoring Penyaluran Hibah / bansos	4 Proposal			Rp - 0	
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90%	Rp 5,392,000		Rp 5,392,000	100%
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Fasilitas Pameran Musrebang Tingkat Kota	8 Dokumen 20 Orang	Rp 5,392,000		Rp 5,392,000	100%
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	80%	Rp 499,846,000			

	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Pemeliharaan Server, Service Mobil, Pemeliharaan Videotron, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Komputer.	1 Unit 11 Unit 1 Unit 15 Unit 15 Unit	Rp 387,550,000		
					Rp 361,442,920	86,83%
	Pengadaan Inventaris Kantor	AC 1PK, Mesin Penghancur Kertas, Kursi Kerja Pejabat.	3 Unit 1 Unit 6 Unit	Rp 112,296,000		
					Rp 107,940,000	96,12%
12	Program Pelayanan Administrasi	Tersedianya/terpenuhinya kebutuhan dalam	100%	Rp 2,452,269,200	Rp 1,033,695,637	88,27%
	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Terfasilitasi dan tersedianya Saranan dan Prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 2,452,269,200		
					Rp 1,033,695,637	88,27%
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Rp 7,865,551,154	Rp 6,458,962,635	85,67%
	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 7,865,551,154		
					Rp 6,458,962,635	85,67%
	JUMLAH			Rp 12,890,756,354	Rp 8,862,343,682	

Tabel 6.2 Indikator Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (DI/TPUT)/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN 2021	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	Pembinaan Anak Terlantar	Persentase penurunan anak terlantar	100.00%	Rp 44,441,600	Rp 19,746,200	44,43%
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dibina dan terlayani	100,00%	Rp 44,441,600	Rp 19,746,200	44,43%
	Sub Kegiatan: Rujukan/Penjangkauan Anak-Anak	Jumlah Anak Terlantar yang Terjangkau	100.00%	Rp 44,441,600	Rp 19,746,200	44,43%
2	Rehabilitasi Sosial	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	100%	Rp 431,014,600	Rp 284,238,000	65,82%
		Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan	100%			
	Penanganan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta	Prosentase Penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	37,32%	Rp 337,496,600	Rp 217,508,000	64,32%
	Sub Kegiatan : 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang ditangani, Terlaksananya bimbingan bagi para Disabilitas	100 Orang 100 Orang	Rp 252,776,600	Rp 150,184,000	59,41%
	2. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tertfasilitasinya Orang Terlantar dalam perjalanan untuk kembali ke daerah asal	360 Orang	Rp 84,720,000	Rp 66,924,000	78,99%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	Prosentase Penurunan Eks Sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman Keras, Eks Narapidana, dan Penyakit Sosial Lainnya).	23,92%	Rp94,318,000	Rp 67,130,000	71,17%

	Sub Kegiatan: 1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	100 Orang	Rp18,000,000	Rp 12,450,000	69,16%
	2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	100 Orang	Rp76,318,000	Rp 54,680,000	71,64%
5	PEMHERDAYAAN SOSIAL	Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif	100,00%	Rp 514,774,600	Rp 370,077,200	71,89%
		Presentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif				
	Pengumpulan Sumbangan dalam Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang	Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial	100,00%	Rp 37,614,400	Rp 36,166,400	42,87%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif	100,00%	Rp37,614,400	Rp 36,166,400	42,97%
	Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif	100,00%	Rp477,160,200	Rp 353,910,800	74,17%
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Partisipasi Relawan Penyuluh yang Aktif				
		80P Karang Taruna, Lomba Pilar-pilar Sosial, Pembinaan Penyuluh Sosial Masyarakat, Pembinaan PSM di Wilayah, dan Sosialisasi Pilar-pilar Kesejahteraan	71 Lembaga 20 Orang 30 Orang 68 Orang 30 Orang	Rp134,724,000	Rp 79,536,000	59,03%
		wawasan/pengetahuan PSKS, Masyarakat Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pembinaan LKKS, Pembinaan Orsos, Sosialisasi SLRT dan Puskesmas, Workshop UEP untuk Lembaga PSKS	379 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 50 Orang	Rp328,800,400	Rp 245,092,000	80,62%

3. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya PSRS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pendampingan Kasus, Sosialisasi Ilmu Psikologi untuk Menunjang Kegiatan LK3	379 orang 20 Orang 25 Orang	Rp13,627,000	Rp 9,282,800	68,11%
4. Program Pemanjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100.00%	Rp 10,230,349,857	Rp 7,794,305,640	76,18%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	88 Point	Rp 46,436,000	Rp 44,990,000
Sub Kegiatan : Penyusun Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (9 Dokumen)	1 NA	Rp 46,436,000	Rp 44,990,000	96,88%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Per Urusan	100%	Rp 8,209,711,805	Rp 6,558,887,869	79,90%
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Kewajiban Pembayaran Jasa Asuransi ASN	14 Bulan	Rp 8,209,711,805	Rp 6,558,887,869	79,90%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100.00%	Rp 607,159,200	Rp 280,777,258	42,95%
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	Rp 17,120,200	Rp 16,329,000	95,17%
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cetakan dan Penggandaan	100.00%	Rp 262,990,000	Rp 100,330,000	38,14%
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja SPPD Luar Daerah	100.00%	Rp 35,280,000	Rp 18,507,250	52,45%

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja SPPD Luar Daerah	100.00%	Rp 291,759,000	Rp 125,611,008	43,08%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah.	85.00%	Rp 89,710,500	Rp 75,066,700	83,67%
Sub Kegiatan : L. Pengadaan Mebel	Lain-lain Lemari dan Arsip Pejabat/Lemari Display, Pengadaan Kursi Pejabat, Pengadaan Meja Pejabat.	1 Unit 103 Bush 1 Paket	Rp 89,710,500	Rp 75,066,700	83,67%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional perangkat daerah (100%)	100.00%	Rp 799,014,152	Rp 598,528,768	74,90%
Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air, Listrik, Surat Kabar, dan Telepon	2400m3 92500kwh 12 bulan	Rp 181,090,000	Rp 117,664,044	64,97%
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor, Bahan Dekorasi, Bahan Komputer, Pengisian Tabung Gas, dan Peralatan Kebersihan	12 Bulan 28 meter 12 bulan 24 buah 12 bulan	Rp 75,712,600	Rp 34,879,300	46,00%

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Asuransi Ketenagakerjaan & Kesehatan, Administrasi Perkantoran, Jasa Keamanan dan Tenaga Kebersihan, Jasa Pengemudi Honorarium Petugas Penginput Data, Honorarium PPK, PPTK, Staff PPTK, Tenaga Kontrak Kerja, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa.	12 Bulan 1 Paket 6 Bulan 12 Bulan 1 Paket	Rp 542,211,552	Rp 445,985,424	82,25%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	12 Bulan	Rp 478,318,200	Rp 255,051,045	53,32%
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1 Paket	Rp 21,000,000	Rp 30,200,400	48,57%
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Aplikasi Server, Komputer/Laptop/note book, Printer, AC, videotron, service mobil, dan Terpeliharannya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung	12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 1 Paket 24 Unit 60 Unit 27 Unit	Rp 301,398,200	Rp 111,947,688	37,80%

3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung, Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial.	12 Bulan	Rp 155,920,000	Rp 130,904,957	83,95%
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KK Miskin (17%)	100%	Rp 2,404,678,600	Rp 355,972,220	14,80%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknik FBI PD Pemda, Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Secara Akurat, Pengembangan Aplikasi SOLID, Pengimputan Verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) pada Aplikasi SIKS-NG, Terlaksananya Rapat Evaluasi Program Sembako	5,78%	Rp 2,404,678,600	Rp 355,972,220	14,80%
Sub Kegiatan : 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan verval dan validasi BDT secara akurat, Pengembangan Aplikasi Sosial Integrasi Data Terpadu, Pengisian Data Prelist BDT dan Pengimputan Verval BDT pada Aplikasi SIKS-NG, Pengkajian Data Prelist BDT pada Aplikasi SIKS- NG ASN dan NON ASN	2 Kegiatan 68 Peserta 74 Peserta	Rp518,384,400	Rp 288,174,520	55,27%

2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Langsung Tunai KPM, Biaya Penyaluran Kantor Pos, Honorarium PPBJ, Honorarium PPK, Terbinannya Pendampingan Sosial PKH, Terlaksananya Rakor Tikor Tingkat Kota Bogor, Terlaksananya Rapat Evaluasi BPNT Tingkat Kecamatan.	5600 KK 5600 KK 1 OB 1 OB 70 Orang 1 Kali 2 Kali	Rp 1,857,017,800	Rp 88,567,700	37,11%
3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan, Bimbingan teknis, dan Pelatihan Keterampilan Bagi Faltir Makin	77 Orang 50 Orang 50 Orang	Rp 29,276,400	Rp - 0	
Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	86,42%	Rp 500,612,400	Rp 210,857,400	42,11%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana	100,00%	Rp 356,092,400	Rp 118,064,500	33,43%
Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang Terlayani, Jumlah Natura	2000 Jiwa 500 Paket	Rp 356,092,400	Rp 118,064,500	33,43%
Penyenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya penanganan dan penanggulangan bencana oleh TAGANA	100,00%	Rp 144,520,000	Rp 91,792,800	63,51%
Sub Kegiatan: Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Tarensi Slags Bencana	Terfasilitasinya penanganan dan penanggulangan bencana oleh TAGANA	100,00%	Rp 144,520,000	Rp 91,792,800	63,51%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Lokasi Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara	100%	Rp 1,367,673,900	Rp 794,372,560	58,16%

7	Peneliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tertaksananya Peneliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	Rp 1.367,673,900	Rp 794,372,560	58,58%
	Sub Kegiatan: 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman	Facilitasi Peneliharaan TMP, Revitalisasi TMP Dreded	1061 Makam 1 TMP	Rp 1.300,000,000	Rp 776,023,310	59,64%
	2. Peneliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Facilitasi Peneliharaan TMP, Tertaksananya Sosialisasi	1061 Makam 1 Kegiatan	Rp 67,673,900	Rp 18,349,250	24,15%
	JUMLAH			Rp15,494,345,557		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Permasalahan isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD perubahan yakni Pembangunan manusia berkeadilan. Pembangunan manusia berkeadilan mewujudkan pembangunan manusia yang penekanannya kepada Perlindungan sosial masyarakat. Adapun prioritas pembangunan yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Fokus pembangunannya lebih menekankan kepada penanganan pengangguran dan Kemiskinan. Isu Strategis Pembangunan manusia yang berkeadilan bertujuan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pembangunan menurunnya kemiskinan prioritas pembangunan dan peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Perlindungan sosial masyarakat dalam permasalahan diimplementasikan kepada meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didalamnya penanganan kepesertaan sebagai anggota BPJS. Intervensi APBD Kota Bogor terkait ruang lingkup BPJS mengutamakan layanan masyarakat yang mengacu kepada parameter kemiskinan.

Isu penanganan Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang berpotensi Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan penduduk kondisi rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk seperti itu biasanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas dalam sektor pekerjaan formal dan tidak memiliki sumber pekerjaan alternatif lain untuk menunjang ekonomi keluarga.

Peluang kerja penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis terlantar, anak terlantar dan penanganan bencana masih kurang memenuhi standar hidup yang layak. Maka Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar. SPM diperlukan untuk mendukung penduduk yang kurang mampu agar dapat kesempatan untuk lingkungan yang inklusif dan penduduk kurang mampu memperoleh penghidupan layak dan memperoleh jaminan sosial yang memadai.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BOGOR

Identifikasi permasalahan merupakan titik awal dalam perumusan kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Adapun rincian pemetaan

permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bogor masih tinggi	Kemiskinan dikarenakan sulitnya lapangan pekerjaan, PHK massal, dan tingkat Pendidikan yang masih rendah	Pandemi Covid-19
2.	Kurangnya kemandirian PMKS	Banyaknya PMKS yang tidak mau graduasi mandiri dari program bantuan sosial pemerintah	PMKS terlena dengan bantuan sosial yang diberikan, masih terdapat program bantuan sosial yang kurang tepat sasaran.
3.	Kurangnya partisipasi PSKS dalam melaksanakan kegiatan sosial	Masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk dapat bergabung dalam PSKS	SDM PSKS yang terkadang masih kurang memumpuni.

Korelasi antara masalah dan kebutuhan menjadi landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan karena belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program;
2. Kemandirian dan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah, dan korban NAPZA masih rendah;
3. Jumlah kasus korban tindak kekerasan semakin meningkat;
4. Aksesibilitas penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mendapatkan pelayanan dasar masih belum terlayani secara optimal;

5. Intervensi pemerintah untuk perlindungan sosial masih seringkali belum tepat sasaran karena kualitas data terpadu masih rendah;
6. Masih adanya kerentanan terhadap konflik sosial di masyarakat;
7. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di masyarakat.
8. Penanganan sosial terhadap korban bencana masih belum optimal;
9. Diskriminasi terhadap kaum penyandang masalah kesejahteraan sosial masih sering terjadi.
10. Meningkatnya jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dimasa pandemi Covid-19.
11. Kurangnya pembinaan dan perhatian dari internal keluarga bagi PMKS.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga”.

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut:

Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya.

Kota yang Ramah Keluarga :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi Kesehatan, Pendidikan, Sosial Masyarakatnya serta Kondisi Infrastruktur Lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan masyarakat serta tata Kelola pemerintahan yang berkompeten.

Adapun Misi untuk mewujudkan visi Kota Bogor tersebut adalah:

1. Mewujudkan Kota Bogor yang sehat.

Kota Bogor yang sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas.

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*) memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Mewujudkan Kota Bogor yang sejahtera.

Kota yang sejahtera adalah kondisi dimana kehidupan masyarakatnya aman, tenteram, damai, adil dan makmur. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Dinas Sosial Kota Bogor memiliki kontribusi langsung terhadap upaya pencapaian visi misi tersebut di atas, khususnya misi ketiga yakni Mewujudkan Kota Bogor yang sejahtera. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bogor untuk mencapai misi ketiga tersebut yaitu melalui penyelenggaraan pelayanan sosial dasar untuk menjamin peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan lahir batin bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan PMKS yang mandiri dan bermartabat.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DINAS SOSIAL KOTA BOGOR

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor diarahkan pada pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Bencana, serta Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodevikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah

Dalam Penerapan Renstra Dinas Sosial Kota Bogor yang mengacu pada RPJMD 2019-2024, mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Kota Bogor yang Ramah Keluarga dengan mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Kota Bogor. Tujuan penataan ruang wilayah Daerah Kota adalah mewujudkan ruang Daerah Kota sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka yang berwawasan lingkungan. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bogor memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Dengan ditetapkannya RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 tentunya akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada dibawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2020-2024. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Kota Bogor, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kota Bogor, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial dalam suatu Kota.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan ke depan.

Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Isu strategis dari penelaahan tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat;
3. Isu strategis dari penelaahan kebijakan pembangunan Kota Bogor yang antara lain terdiri dari RPJMD dan RTRW Kota Bogor;

4. Isu strategis dari penelahaan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;
5. Dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan kota Bogor.
6. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan kota Bogor.

Isu strategis Dinas Sosial Kota Bogor selanjutnya diidentifikasi dalam isu pembangunan pilar sosial yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan yaitu tujuan (1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan; tujuan (2) menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; tujuan (3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; tujuan (4) menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan tujuan (5) mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

A. Isu Strategis Penurunan Angka Kemiskinan

Isu Strategi penurunan kemiskinan dengan pendekatan pembangunan berkeadilan merupakan bentuk nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap elemen yang lemah.

Didalam RPJMD perubahan isu strategis yang menekankan penurunan angka kemiskinan salah satunya fokus terhadap tujuan pembangunan yakni terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pembangunan menurunnya kemiskinan dengan prioritas peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain:

- a. Angka Kemiskinan
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari nilai agregat dari *poverty gap index*

adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dan pengentasan kemiskinan bagi target sasaran bantuan dan program.

- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
- d. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adanya pandemi Covid-19, menyebabkan aktivitas ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga terganggu bahkan menurun dari kondisi biasanya, hal ini berpotensi bagi warga yang rentan miskin (berada sedikit diatas garis kemiskinan) akan menjadi miskin. Peningkatan kemiskinan ini dapat dilihat dari kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2020. Perlu penanganan di sisi pendapatan dengan berupaya mempertahankan pendapatan atau membuka peluang usaha/peluang kerja, sementara disisi pengeluaran perlu dilakukan meminimalisir pengeluaran dengan cara adanya subsidi, perlindungan sosial, dan *conditional cash transfer*.

B. Analisis Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang sehingga harus diantisipasi. Isu strategis bagi Dinas Sosial Kota Bogor diperoleh menggunakan metode analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal berupa identifikasi kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dapat dikendalikan secara langsung. Analisis eksternal berupa identifikasi kondisi yang dapat menciptakan peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang berada di luar kendali organisasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Analisis Internal

1. Kekuatan (*Strenght*)
 - a. Memiliki konsistensi terhadap komitmen peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik.
 - c. Memiliki semangat melayani *stakeholder*.
 - d. Memiliki Loka Bina Karya dan Rumah Singgah.
 - e. Memiliki kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Tagana, PSM, TKSK, Karang Taruna, Pendamping PKH, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Pekerja Sosial, WKSBM).
2. Kelemahan (*Weakness*)
- a. Pelaksanaan program yang belum optimal.
 - b. Efektivitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik.
 - c. Masih kurangnya tenaga fungsional yang kompeten di bidangnya (pekerja sosial, penyuluh sosial).
 - d. Terbatasnya jumlah personil Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas fungsi.
 - e. Terbatasnya sarana prasarana.
 - f. Pelayanan kepada masyarakat dan khususnya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum optimal.
 - g. Masih perlu ditingkatkan koordinasi yang baik dengan pihak terkait.
 - h. Belum adanya Pusat Kesejahteraan Sosial.

Analisis Eksternal

- 1. Peluang (*Opportunity*)
 - a. Menjalin kerja sama yang baik dengan mitra kerja.
 - b. Mendirikan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial milik Pemerintah Kota Bogor.
 - c. Kesiapsiagaan tanggap darurat bencana.
 - d. Menciptakan perubahan *mindset* (pola berpikir) dan mandiri.
- 2. Ancaman (*Threat*)
 - a. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terbatas.
 - b. Semakin meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - c. Tidak adanya tempat rehabilitasi kesejahteraan sosial hasil penjangkauan/penjaringan.
 - d. Masih adanya eksploitasi terhadap PMKS oleh oknum tertentu.

C. Telaahan Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial

kemasyarakatan dan bencana alam. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bogor

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan Sasaran menjadi Kebijakan Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bogor mengacu pada visi dan misi Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4 (T-C.25).
Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Kota Bogor**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
A. Tujuan 1: Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan Melayani (<i>smart government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	BB	BB	A	A	A	A
Sasaran: Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	BB	BB	A	A	A	A
B. Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini Rasio	Point	0,41	0,4	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36
Sasaran: Menurunnya Kemiskinan (meningkatnya kemandirian PPKS dan meningkatnya peran serta PSKS)	Angka Kemiskinan	%	5,93	5,8	5,78	5,53	5,28	5	5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024 adalah ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategis dan Arah kebijakan Dinas Sosial Kota Bogor utamanya menjawab tantangan yang tertuang didalam visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 5 tahun kedepan. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 5 (T-C.26)
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Sosial Kota Bogor

Visi	: Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
Misi	: Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)	Prioritas Pembangunan (5)

Visi	: Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
Misi	: Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)	Prioritas Pembangunan (5)
Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan Melayani (<i>Smart Government</i>)	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Mengembangkan sistem pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintah.	1. Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i> dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan (<i>open government</i>).	Penguatan Reformasi Birokrasi
			2. Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas.	
			3. Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	
			4. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja.	
			5. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.	
			6. Penguatan Kapasitas Aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas	

Visi	: Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
Misi	: Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)	Prioritas Pembangunan (5)
			dan fungsi setiap aparaturnya.	
			7. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparaturnya yang profesional dan "smart".	
			8. Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.	
			9. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
			10. Penataan Peraturan Perundang-undangan yang masih tumpang tindih	
Misi	: Mewujudkan Kota yang Sejahtera			
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin terdampak pandemi Covid-19	1. Menjamin adanya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19 2. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Visi	: Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
Misi	: Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)	Prioritas Pembangunan (5)
			3. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Bogor

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Bogor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, melalui strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020 – 2024 dirumuskan sebagai dasar pelaksanaannya melalui program dan perubahan RPJMD dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas sosial sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa, komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pemberdayaan Sosial**
- 2.1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang
- 2.2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 3. Program Rehabilitasi Sosial**
- 3.1. Kegiatan Reabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
- Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 3.2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial**
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
- 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
- 4.1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar**

- Penjangkauan Anak-anak Terlantar
 - Rujukan Anak-anak Terlantar
 - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- 4.2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/kota**
- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- 5. Program Penanganan Bencana**
- 5.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial Kabupaten/Kota**
- Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial
- 5.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
- Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
- 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**
- 6.1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Rencana program kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja program kegiatan, sub kegiatan dan target kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif sebagaimana diuraikan dalam tabel 6 berikut:

		1. Pemeliharaan Taman Malaka Museum Nasional Indragiri-Riau	Jumlah Induk yang Terpasang Pemerataan pada Taman Malaka Museum Nasional	640 cm	16	16	16	200	16	16	10%	Rp	32.000.000	10%	Rp	3.200.000	10%	Rp	3.200.000
Terwujudnya Museum di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor			Selaku Reformasi Birokrasi	6000	3	30	30	30	6		0			6					
	Meningkatkan kualitas indeks Presendikan yang yang akan dan Jumlah di Lingkungan Daerah		Index Reformasi Birokrasi	6000	16	16	16	16	16.00		60			60					
		WISUMAT (PPL/PLM) SUKSES PENGALAMAN CAJARAN KAD/PLM/KOTA	Melakukan Energi malam Pemerintah Lingkungan Daerah	6000	0	00	-	00	6		0			0					
		Perencanaan, Pengorganisasian dan Pengawasan Lingkungan Daerah	Melakukan Energi malam Pemerintah Lingkungan Daerah	6000				00	6		0			0					
		WISUMAT (PPL/PLM) SUKSES PENGALAMAN CAJARAN KAD/PLM/KOTA	Melakukan reformasi Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkungan Daerah	6000	0.01	0.11	0.31	0.71	0.80		0.80			0.80					
		Administrasi Lingkungan Daerah	Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengawasan	Person				100	100		100			100					
		Administrasi Pengawasan Lingkungan Daerah	Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengawasan	Person				100	100		100			100					

		Administrasi Umum Peringkat Daerah	Perantara pemerintah kabupaten perantara peringat daerah	Peran				100	100		100						
		Pengadaan Jasa Perundingan Usaha Perantara Daerah	Perantara Perantara perantara jasa perundingan usaha pemerintahan daerah	Peran				100	100		100						
		Pengadaan Barang Jasa Daerah Perundingan Usaha Perantara Daerah	Perantara Perantara barang Perantara perundingan usaha pemerintahan daerah kabupaten	Peran				100	100		100						
		Perwakilan Barang Jasa Daerah Perundingan Usaha Perantara Daerah	Perantara Perwakilan barang jasa kabupaten kota	Peran				100	100		100						

Nilai 3 - Menunjukkan nilai besar yang signifikan

Tabel 1																		DAK	DAK	
																		100%	100%	100%
			Prosedur Pelayanan tidak yang legal sesuai	%	NA	100	100	100	100		100%							100%		
		Kelembagaan Kelembagaan PMS Kelembagaan Kelembagaan PMS	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan PMS Kelembagaan Kelembagaan PMS Kelembagaan Kelembagaan PMS	%	NA	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelembagaan Kelembagaan PMS Kelembagaan Kelembagaan PMS	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan PMS Kelembagaan Kelembagaan PMS Kelembagaan Kelembagaan PMS	%	NA	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelembagaan Kelembagaan PMS Kelembagaan Kelembagaan PMS	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan PMS Kelembagaan Kelembagaan PMS Kelembagaan Kelembagaan PMS	%	NA	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		2. RESTRUKTURISASI	Proyek baru, fitting dan MTO yang dibutuhkan	%	Jumlah awal fitting dan MTO = 247 (24.83)	22.75	247	247	247									
	Proyek pemenuhan 40 penyedot debu (10 Pengumpul Debu, 30 Pengumpul, dan 10 Menerima debu, 400, 400, 400, dan 400) untuk Lemayud		%	Pemenuhan 400 fitting (79.00)	22.72	247	247	247	Rp	340.140.000	Rp	1.242.000.000	Rp	1.000.000.000	247	Rp	1.000.000.000	
	Proyek Pemenuhan 200 fitting dan 200 fitting yang dibutuhkan		%	Pemenuhan 200 (100%)	200	200	200	200										
	Perawatan dasar bekaman dan pengisian oli untuk yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan teknis		%	1 Unit (100)	100	100	100	100										
	Ukuran Lemayud yang dibutuhkan		orang	200 orang	100	40	100	100										
		Bagian 2. Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) per Blok (IPAB) Lemayud. Mula-mula IPAB dan IPAB di Laut Tirta Indah	Proyek Pemenuhan PRC Lemayud (Substansi PUMD dan WAFD di Laut Tirta Indah)	%	64	64	64	64	Rp	270.000.000	Rp	990.000.000	Rp	990.000.000	200	Rp	990.000.000	
			Proyek yang Mendukung Lokasi IPAB dan Pengisian Pemenuhan Kapasitas	%	64	64	64	64	Rp	22.000.000	Rp	94.000.000	Rp	40.000.000	200	Rp	40.000.000	
			Jumlah orang yang Mendukung Lokasi dan Pengisian Pemenuhan Kapasitas	orang	64	64	64	140	Rp	22.000.000	Rp	94.000.000	Rp	40.000.000	140	Rp	40.000.000	
			Ukuran Pabrik Saringan Pasir, Sema, dan Sema di Laut Tirta Indah	orang	64	64	64	700	Rp	80.000.000	Rp	300.000.000	Rp	300.000.000	700	Rp	300.000.000	
			Jumlah orang yang Mendukung Pelayanan dan Pemenuhan Kapasitas	orang	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
			Jumlah orang yang Mendukung dan Pemenuhan Kapasitas yang Terdiri dari 1 Tahun Pemenuhan Kapasitas	orang	64	64	64	64	64	Rp	22.000.000	Rp	94.000.000	Rp	40.000.000	64	Rp	40.000.000

		Salip Hesperian 1. Penyediaan Perbaikan Sambungan di luar Bumi	Jumlah Uang yang Diperkirakan Diperlukan untuk melakukan perbaikan Sambungan di luar Bumi dan kegiatan Kekapabilitas/nya	Uang	SA	SA	SA	SA	SA	SA	Rp	21.275.000	SA	Rp	21.275.000	SA	Rp	21.275.000	SA	Rp	21.275.000
		Salip Hesperian 6. Jemberan Sambungan Sosial Kegiatan Kelangka Perumahan Pusat Kecamatan/Desa KPR/Lampung Bukan Terbatas	Jumlah proyek dalam Pembinaan Sambungan Sosial seperti Kelangka Perumahan, Kegiatan Kelangka Sosial (KPKS) Lampung Bukan Terbatas KPR/Lampung dan KPR/Lampung Kekapabilitas/nya	Uang	SA	SA	SA	SA	SA	SA	Rp	42.140.000	SA	Rp	42.140.000	SA	Rp	42.140.000	SA	Rp	42.140.000
		Anggaran 2 Kekapabilitas Sosial Desa Perumahan Kekapabilitas Terbatas, Anak Terbatas, Lainnya Terbatas, dan Kelangkaan Pusat di Luar Bumi	Pembinaan Perumahan Perumahan Kekapabilitas Terbatas, Anak Terbatas, Lainnya Terbatas, serta Kelangkaan Pusat di Luar Bumi																		
		Salip Hesperian 1. Penyediaan Perumahan	Jumlah Uang yang Diperkirakan Diperlukan yang Terdiri dari 2 Tahun dan kegiatan sub-nya	Uang	SA	SA	Rp	19.440.000	SA	Rp	19.440.000	SA	Rp	19.440.000							
		Salip Hesperian 2. Penyediaan Kegiatan	Jumlah Uang yang Diperkirakan Diperlukan yang Terdiri dari 2 Tahun dan kegiatan sub-nya	Uang	SA	SA	Rp	2.240.000	SA	Rp	2.240.000	SA	Rp	2.240.000							
		Salip Hesperian 4. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Uang yang Diperkirakan Diperlukan untuk membeli barang untuk kegiatan Kemandirian Kekapabilitas/nya	Uang	SA	SA	Rp	44.897.000	SA	Rp	44.897.000	SA	Rp	44.897.000							
		Salip Hesperian 4. Jemberan Sambungan Sosial Kegiatan Kelangka Perumahan Pusat Kecamatan/Desa KPR/Lampung Bukan Terbatas	Jumlah Proyek dalam Pembinaan Sambungan Sosial seperti Kelangka Perumahan, Kegiatan Kelangka Sosial (KPKS) Lampung Bukan Terbatas KPR/Lampung dan KPR/Lampung Kekapabilitas/nya	Uang	SA	SA	Rp	247.560.000	SA	Rp	247.560.000	SA	Rp	247.560.000							
		Salip Hesperian 6. Jemberan Sambungan Sosial Kegiatan Kelangka Perumahan Pusat Kecamatan/Desa KPR/Lampung Bukan Terbatas	Jumlah Proyek dalam Pembinaan Sambungan Sosial seperti Kelangka Perumahan, Anak Terbatas, Lain-lain Terbatas, serta Kelangkaan Pusat dan Kelangkaan Kemandirian Kekapabilitas/nya	Uang	SA	SA	Rp	187.000.000	SA	Rp	187.000.000	SA	Rp	187.000.000							
		Salip Hesperian 6. Jemberan Sambungan Sosial Kegiatan Kelangka Perumahan Pusat Kecamatan/Desa KPR/Lampung Bukan Terbatas	Jumlah Uang yang Diperkirakan Diperlukan untuk melakukan kegiatan Kemandirian Kemandirian Kekapabilitas/nya	Uang	SA	SA	Rp	27.900.000	SA	Rp	27.900.000	SA	Rp	27.900.000							

		1. Program Perbaikan dan Sumbat Sektir	Perbaikan jumlah PMS yang terganggu	%	jumlah PMS/MS yang terganggu = 15.754.000 (40.541 (21.47%))	75,32	88,52	89,20	87,20		88,40	88,52	88,52			
			Perbaikan 40 Sektir	%	jumlah PMS terganggu = 11.187.000 (27.350 pers (1.45))	75,32	88,52	89,20	87,20	Rp 427.000.000	20,24	Rp 567.000.000	28,46	Rp 600.750.000	30,46	Rp 600.750.000
			Perbaikan pemrosesan awal Sektir	%	jumlah Sektir terganggu = 4.567 (0,27)	75,32	88,52	75,32	40,6		11,49		200		200	
		Program 2: Pengalihan Data Paksi Sektir Cakupan Daerah Sukawati/Kota	Perbaikan jumlah faktur antara yang Available Sektir Aplikasi SRS-D	orang	NA	NA	NA	200	2.000	Rp 500.750.000	20000	Rp 600.750.000	60000	Rp 600.750.000	200	Rp 600.750.000
		Sub Program 1: Perbaikan Faktur Sektir Cakupan Daerah Sukawati/Kota	Perbaikan jumlah data terdapat SRS-D yang tidak terdapat di aplikasi SRS-D (Sektir Sektir) dan Program Sektir Sektir (Sektir Sektir) dan Program Sektir Sektir (Sektir Sektir) dan Program Sektir Sektir (Sektir Sektir)	Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Rp 400.000.000					
		Sub Program 2: Perbaikan Faktur Sektir Cakupan Daerah Sukawati/Kota	Perbaikan jumlah data terdapat SRS-D yang tidak terdapat di aplikasi SRS-D (Sektir Sektir) dan Program Sektir Sektir (Sektir Sektir) dan Program Sektir Sektir (Sektir Sektir)	%	NA	NA	NA	200	200	Rp 400.000.000	200	Rp 400.000.000	200	Rp 400.000.000	200	Rp 400.000.000

		Sub Anggaran 11 Perencanaan Terdapat Perencanaan	Jumlah Anak Yatim yang bersekolah di Tepelikan Kecamatan Kabupaten/Kota	Daerah	SA	SA	SA	SA	SA	SA	Rp	2,000,000	SA	Rp	80,000,000	200	Rp	40,000,000	200	Rp	40,000,000	
		4. PEMERIKSAAN SKM	Perencanaan lembaga kesejahteraan sosial yang ada	SA		27,91	27,91	100	100		Rp	110,400,000		Rp	440,000,000		Rp	70,000,000		Rp	70,000,000	
			Perencana partisipasi rencana Perencana sosial yang ada	SA		Revisi 4407,000 Daerah = 20,47%	20,45	27,92	81,89	84		80			85		85					
		Pengumpulan Sumber-sumber dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ada	Lembaga	SA	SA	SA	111 lembaga	111 lembaga		Rp	6,000,000	111 lembaga	Rp	21,000,000	111 lembaga	Rp	20,000,000	111 lembaga	Rp	20,000,000	
		Sub Anggaran Mendukung dan Mendukung Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan	Perencanaan lembaga kesejahteraan sosial yang ada	SA	SA	SA	200	200		Rp	4,000,000											
		Sub Anggaran Mendukung dan Mendukung Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan	Jumlah lembaga sosial mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan	Dukungan	SA	SA	SA	5	5		Rp	4,000,000	5	Rp	20,000,000	5	Rp	20,000,000	5	Rp	20,000,000	
		Pengembangan Mendukung sumber Mendukung sumber Mendukung sumber	Perencanaan lembaga kesejahteraan sosial yang ada	SA		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (RIS) / yang sudah dan rencana SA lembaga (100%)	SA	SA	27,20	200		Rp	100,000,000	100	Rp	400,000,000	200	Rp	70,000,000	200	Rp	70,000,000
		Sub Anggaran Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan	SAK Ringing Teratai, Latihan Pekar Sosial, Pendidikan Persekolah Sosial Mendukung dan, Pendidikan PSM SA	SA	SA	SA	SA	25,27	200		Rp	20,000,000										
		Sub Anggaran Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan	Jumlah yang Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan Mendukung dan	Daerah	SA	SA	SA	20	20		Rp	20,000,000	20	Rp	20,000,000	20	Rp	20,000,000	20	Rp	20,000,000	

		1) Kegiatan Kelompok Fokus Gender	Meningkatkan wawasan/kearifan lokal, Menguatkan Role-Model dalam Pengembangan Potensi Perempuan Lokal, Perbaikan (PPL), Workshop (WJ), Workshop (WJ) dan Pustaka, Workshop (WJ) untuk Lembaga PML	%	94	94	94	94	92,57	200	Rp	38.211.200	100	Rp	33.875.000	100	Rp	30.000.000	100	Rp	30.000.000
		2) Kegiatan Kelompok Fokus Gender	Unit/Lembaga Masyarakat Lokal yang Mengikuti Kegiatan Pemangangan Kabupaten/Kota	terhadap	94	94	94	94	111	111	Rp	36.715.100	100	Rp	33.475.000	100	Rp	30.000.000	100	Rp	30.000.000
		3) Kegiatan Kelompok Fokus Gender	Meningkatkan PPL yang ARII dalam Pengembangan Kapasitas Lokal, Perencanaan Basis, dan/atau Misi-Perilaku untuk Memerang Ragi dan LPI	%	94	94	94	94	111,12	200	Rp	23.277.400									
		4) Kegiatan Kelompok Fokus Gender	Unit/Lembaga yang ada di luar Kegiatan Kelompok Fokus Adanya dan Lembaga-Kemampuan Masyarakat Kabupaten/Kota	terhadap	94	94	94	94	11	11	Rp	25.173.400	11	Rp	42.111.000	11	Rp	31.000.000	11	Rp	31.000.000
		5. Program Pengabdian Masyarakat	Perencanaan Sosial Berbasis Adhik Ber-Orang yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Kondisi-Gesah (Tanggap Bencana) Berbasis Desa/ Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	200	Rp	30.000.000	100%	Rp	30.000.000	100%	Rp	30.000.000	100%	Rp	30.000.000
		Perencanaan Sosial Berbasis Adhik Ber-Orang dan Sosial Kabupaten/Kota	Perencanaan Terpadu/terintegrasi Kabupaten/ Kota/ Bagi Berbasis Adhik Ber-Orang	%	94	94	94	94	100	100	Rp	28.420.000	100	Rp	45.111.000	100	Rp	40.000.000	100	Rp	40.000.000
		Sub-Program 1. Penyediaan Makanan	Terpenuhi Kebutuhan Dasar Bagi Berbasis Adhik Ber-Orang	%	94	94	94	94	91	100	Rp	30.420.000									
		Sub-Program 1. Penyediaan Makanan	Unit/Lembaga yang Mengikuti Perencanaan (PPL) dan/atau Misi-Perilaku (Pengabdian) Pemangangan Kabupaten/Kota	terhadap	94	94	94	94	100	100	Rp	28.270.000	100	Rp	33.111.000	100	Rp	30.000.000	100	Rp	30.000.000
		Sub-Program 2. Penyediaan Sandang	Unit/Lembaga yang Memerang Potensi-nya/kearifan lokalnya yang Terpenuhi dalam 1 Tahun Pemangangan Kabupaten/Kota	%																	

		Sub-kegiatan 1. Penyediaan Bantuan	Umbul Umbul yang dilaksanakan kegiatan dan diserahkan kepada yang terkait pada Monev Tenggol Darurat (Pengangan) dan Pemas Bantuan Kecamatan Kabupaten/Kota	Umbul	64	64	64	64	64	64	70	Rp	21.440.000	70	Rp	21.440.000	70	Rp	21.440.000	
		Sub-kegiatan 1. Penyediaan Tenggol Pengangan Pengangan	Umbul Tenggol Pengangan Kecamatan Kabupaten/Kota	Umbul	64	64	64	64	64	64	2	Rp	11.000.000	2	Rp	11.000.000	2	Rp	11.000.000	
		Sub-kegiatan 4. Pengangan Monev Tenggol Kecamatan	Umbul Umbul yang dilaksanakan Pengangan Monev Tenggol Kecamatan Kabupaten/Kota	Umbul	64	64	64	64	64	64	100	Rp	11.000.000	100	Rp	11.000.000	100	Rp	11.000.000	
		Sub-kegiatan 5. Pengangan Umbul	Umbul Umbul Bantuan yang dikembangkan sistem Umbul Kecamatan Kabupaten/Kota	Umbul	64	64	64	64	64	64	70	Rp	4.000.000	70	Rp	4.000.000	70	Rp	4.000.000	
		Pengembangan Pembinaan Monev dan Tenggol Pengangan Kecamatan Kabupaten/Kota	Umbul Umbul bantuan dan pengembangan bantuan untuk Tenggol	R	64	64	64	100%	100%	Rp	141.040.000	100%	Rp	141.040.000	100%	Rp	141.040.000	100%	Rp	141.040.000
		Sub-kegiatan 1. Bantuan, Kecamatan, dan Pengangan Tenggol Kecamatan	Umbul Umbul bantuan dan pengembangan bantuan untuk Tenggol	R	64	64	64	64	100	Rp	141.040.000									
		Sub-kegiatan 1. Bantuan, Kecamatan, dan Pengangan Tenggol Kecamatan	Umbul Umbul yang dilaksanakan Kecamatan, Kecamatan, dan Kecamatan Tenggol Tenggol Bantuan Kecamatan Kabupaten/Kota	Umbul	64	64	64	64	70	Rp	141.040.000	70	Rp	141.040.000	70	Rp	141.040.000	70	Rp	141.040.000

6.2. Realisasi Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Bogor

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bogor dilaksanakan melalui beberapa program kerja, kegiatan, dan sub kegiatan. Program kerja tersebut dilaksanakan menggunakan dana APBD Kota Bogor. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bogor pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 dirinci dalam Tabel Transisi sebagai berikut:

1. Tabel Transisi Dinas Sosial Tahun 2019

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Prosentase Anak Terlantar yang Ditangani	19,48%	Rp 3,200,000
	Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dibina dan Terlayanani	75 Orang	Rp 3,200,000
		Jumlah anak yang di adopsi	10 Orang	
2	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina	92,98%	Rp 29,800,000
		Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi	92,98%	
	Pembinaan Yayasan Sosial / Orsos / Panti Asuhan	1. Terlaksananya Pembinaan Bagi Yayasan Sosial / Orsos./ Panti Sosial 2. Sosialisasi Akreditasi Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial	83 Yayasan 78 Peserta	Rp 29,800,000
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	100%	Rp 60,800,000
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Disabilitas	Terlaksananya Bimbingan bagi Para Disabilitas	75 Orang	Rp 60,800,000
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	85%	Rp 23,972,000
	Penyediaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang KIP	Prosentasi Pelayanan Publik yang Berbasis Sistem Informasi	BB	Rp 23,972,000
5	Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psicotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	8%	Rp 206,310,000

Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah	Terlayannya PMKS dan orang terlantar di rumah singgah	100 Orang	Rp 162,010,000
Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking			Rp 2,190,000
Pembinaan Bagi Korban Narkotika dan HIV/AIDS, WTS, dan Eks Psikotik			Rp 42,110,000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase keluarga miskin yang tergraduasi	98%	Rp 854,883,500
Pemutakhiran Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dimutakhirkan	99,94%	Rp 37,890,000
Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)	1. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT secara akurat 2. Pelatihan Pengisian Data Prelist BDT dan Penginputan Hasil Verval PBI JKN pada Aplikasi SIKS-NG Non PNS dan Kepala Seksi Kemasyarakatan.	2 Kegiatan 74 Peserta 68 Peserta	Rp 47,880,000
Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Terfasilitasinya Orang Terlantar dalam Perjalanan untuk kembali ke Daerah Asal	360 Orang	Rp 129,675,000
Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia)	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Ditangani	100 Orang	Rp 32,350,000
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	1. Terlaksananya bimbingan Pemantapan Pendamping dan Pengelola KUBE 2. Terlaksananya Validasi data WRSE 3. Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Sosial Barang bagi WRSE	77 Orang 50 Orang 50 Orang	Rp 52,328,500
Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan PKH	1. Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin yang Harus	17.039 RTSM	Rp 51,140,000
Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Tertanganinya Korban Bencana Dalam Kebutuhan Pemenuhan Dasar	2000 Jiwa	Rp 237,525,000

	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	1. Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan WTS yang Ditangani 2. Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial	85 Orang 75 Orang	Rp	198,530,000
	Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai	Terlaksananya Rapat Tikor Tingkat Kota Bogor, Terlaksananya Rakor Evaluasi BPNT, dan Laporan Hasil Kegiatan	1 Kali 2 Kali 5 Buku	Rp	67,565,000
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	Rp	349,908,500
		Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif			
	Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	100%	Rp	12,990,000
	Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat	Meningkatnya Jumlah PSKS yang dibantu dan terbina	100%	Rp	243,530,000
	Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial	Terlaksannnya Pembinaan Untuk PSKS lain. Kemitraan Dunia Usaha dan Penyuluh Kesejahteraan Sosial	100%	Rp	37,038,000
	Pemeliharaan TMP Dreded	Fasilitasi Pemeliharaan TMP	1061	Rp	56,350,500
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)	90%	Rp	2,191,000
		Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)	Jumlah Verifikasi Usulan Hibah / Bansos Jumlah Monitoring Penyaluran Hibah / bansos		
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90%	Rp	21,795,000

	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	8 Dokumen, 20 Orang	Rp 21,795,000
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	80%	Rp 1,650,000,000
	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Sosial	100%	Rp 750,000,000
	Pengadaan Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	100%	Rp 900,000,000
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya/terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial	100%	Rp 2,697,140,000
	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Terfasilitasi dan tersedianya Saranan dan Prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 2,697,140,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	100%	Rp 7,227,058,121
	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 7,227,058,121
	JUMLAH			Rp 13,127,058,121

2. Tabel Transisi Dinas Sosial Tahun 2020

Tabel 2.5 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN 2020	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Prosentase Anak Terlantar yang Ditangani	19,48%	Rp 74,235,000
	Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dibina dan Terlayanani	75 Orang	Rp 74,235,000
		Jumlah anak yang di adopsi	10 Orang	
2	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina	100%	Rp 10,135,000
		Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi		
	Pembinaan Yayasan Sosial / Orsos / Panti Asuhan	Terlaksananya Pembinaan Bagi Yayasan Sosial / Orsos/ Panti Sosial, Sosialisasi Akreditasi Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial	83 Yayasan 78 Peserta	Rp 10,135,000
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	29,58%	Rp 132,015,000
	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Disabilitas	Terlaksananya Bimbingan bagi Para Disabilitas	75 Orang	Rp 94,011,000
	Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking	Prosentase jumlah Kasus yang diintervensi	100%	Rp 38,004,000
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media	100%	Rp 3,040,000
	Penyediaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang KIP	Prosentasi Pelayanan Publik yang Berbasis Sistem Informasi	100%	Rp 3,040,000

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Prosentase Anjal, Gepeng, dan WTS yang Direhabilitasi Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	21,41 % 8%	Rp 70,225,000
Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah	Terlayannya PMKS dan orang terlantar di rumah singgah	100 Orang	Rp 70,225,000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase keluarga miskin yang tergraduasi	98%	Rp 981,453,800
Verifikasi dan Validasi BDT (Basis Data Terpadu)	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT, Pelatihan Pengisian Data Prelist BDT dan Pengimputan Hasil Verval BDT pada Aplikasi SIKS-NG Non PNS dan Kepala Seksi Kemasyarakatan	2 Kegiatan 74 Peserta 68 Peserta	Rp 351,618,600
Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Terfasilitasinya Orang Terlantar dalam Perjalanan untuk Kembali ke Daerah	360 Orang	Rp 50,125,000
Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia)	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang ditangani	100 Orang	Rp 44,493,000
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Pembinaan KUBE	Terlaksananya bimbingan Pemantapan, Pendampingan, dan Pengelola KUBE. Terlaksananya validasi data WRSE, Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Sosial Barang bagi WRSE.	77 Orang 50 Orang 50 Orang	Rp 74,639,000

	Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan PKH	Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang ditangani, Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial, Terlaksanannya Rapat Tim Koordinasi PKH, Terlaksanannya Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kompetensi Pendampingan Sosial	17.039 KSM 84 Orang 23 Orang 84 Orang	Rp	23,813,700
	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Tertanganinya Korban Bencana dalam Kebutuhan Pemenuhan Dasar	2000 jiwa	Rp	289,378,000
	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Jumlah PMKS yang ditangani, Pelatihan dan Keterampilan	85 Orang	Rp	83,662,000
	Pembinaan Bagi Wanita Tuna Susila, Kelompok Minoritas, dan Eks Narapidana	Jumlah Kelompok Minoritas dan Eks Narapidana dibina	50 Orang	Rp	46,447,000
	Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai	Terlaksanannya Rapat Tikor Tingkat Kota Bogor, Terlaksanannya Rakor Evaluasi BPNT, dan Laporan Hasil Kegiatan.	1 Kali 2 Kali 5 Buku	Rp	17,277,500
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	98%	Rp	857,417,000
		Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif			
	Penumbuhan Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Bogor	Jumlah Puskesmas yang terbentuk, Jumlah Anggota Puskesmas yang dibina, dan Sosialisasi Puskesmas	6 Puskesmas 16 Orang 90 Peserta	Rp	16,217,000

Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat	Meningkatnya Jumlah PSKS yang dibantu dan terbina, Meningkatkan Jumlah PSKS yang dibantu, Terbentuknya UEP untuk PSKS, Terlaksananya Bimtek Karang Taruna, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, Terlaksananya Workshop PSKS, Terlaksananya Seleksi Pilar-Pilar Sosial Masyarakat.	100 PSKS 10 PSKS 2 UEP 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	Rp 140,938,000
Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial	Kemitraan PSKS lain dari Dunia Usaha, Sosialisasi LKS dan Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Monitoring dan Pembinaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau	100%	Rp 43,475,000
Pemeliharaan TMP Dreded	Fasilitasi Pemeliharaan TMP Dreded dan Revitalisasi TMP Dreded	1061 Makam 1 TMP	Rp 618,864,000
Peningkatan Kapasitas LK3	Jumlah kasus yang ditangani	20	Rp 3,840,000
Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Restorasi Sosial	Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Restorasi Sosial, Jumlah Peserta Sosialisasi	6 Kegiatan 180 Peserta	Rp 16,102,000
Pembekalan Calon Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat	Penyuluh Sosial Masyarakat bersertifikat, bimbingan teknis Penyuluh Sosial Masyarakat, Sosialisasi di lokasi PPKS	5 Orang 25 Peserta 250 Peserta	Rp 17,981,000

8	Program Pengembangan Data dan Informasi.	Prosentase Data dan Informasi Sesuai Kebutuhan Perencanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan	90%	Rp	86,822,000
	Pengembangan Aplikasi PMKS dan PSKS	Updating Data PMKS dan PSKS yang Akurat, Terpeliharannya aplikasi PMKS dan PSKS	90% 1 Paket	Rp	86,822,000
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan (ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keuangan daerah) (%)	90%	Rp	1,691,000
	Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)	Jumlah Verifikasi Usulan Hibah / Bansos Jumlah Monitoring Penyaluran Hibah / bansos	5 Proposal 4 Propos	Rp	1,691,000
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90%	Rp	5,392,000
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Fasilitas Pameran Musrembang Tingkat Kota	8 Dokumen 20 Orang	Rp	5,392,000
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	80%	Rp	450,546,000
	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Pemeliharaan Server, Service Mobil, Pemeliharaan Videotron, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Komputer.	1 Unit 11 Unit 1 Unit 15 Unit 15 Unit	Rp	387,550,000
12	Pengadaan Inventaris Kantor	AC 1PK, Mesin Penghancur Kertas, Kursi Kerja Pejabat, Penghisap Debu, Kursi Sice	3 Unit 1 Unit 6 Unit	Rp	62,996,000
	Program Pelayanan Administrasi	Tersedianya/terpenuhinya kebutuhan dalam	100%	Rp	2,452,269,200

	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Terfasilitasi dan tersedianya Saranan dan Prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 2,452,269,200
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Rp 7,865,551,154
	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 7,865,551,154
	JUMLAH			Rp 12,990,792,154

3. Tabel Transisi Tahun 2021

Tabel 2.6 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN 2021	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	Pembinaan Anak Terlantar	Persentase penurunan anak terlantar	100,00%	Rp 44,441,600
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dibina dan terlayani	100,00%	Rp 44,441,600
	Sub Kegiatan: Rujukan/Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terjangkau	100,00%	Rp 44,441,600
2	Rehabilitasi Sosial	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	100%	Rp 431,814,600
		Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan	100%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Prosentase Penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	37,32%	Rp 337,496,600
	Sub Kegiatan : 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang ditangani, Terlaksananya bimbingan bagi para Disabilitas	100 Orang 100 Orang	Rp 252,776,600
	2. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terfasilitasinya Orang Terlantar dalam perjalanan untuk kembali ke daerah asal	360 Orang	Rp 84,720,000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Prosentase Penurunan Eks Sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman Keras, Eks Narapidana, dan Penyakit Sosial Lainnya).	23,92%	Rp94,318,000

3	Sub Kegiatan: 1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	100 Orang	Rp18,000,000
	2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100 Orang	Rp76,318,000
	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif	100.00%	Rp 514,774,600
		Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif		
	Pengumpulan Sumbangan dalam daerah	Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial	100.00%	Rp 37,614,400
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif	100.00%	Rp37,614,400
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif Presentase Partisipasi Relawan Penyuluh yang Aktif	100.00%	Rp477,160,200
	Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	BOP Karang Taruna, Lomba Pilar-pilar Sosial, Pembinaan Penyuluh Sosial Masyarakat, Pembinaan PSM di Wilayah, dan Sosialisasi Pilar-pilar Sosial	71 Lembaga 20 Orang 30 Orang 68 Orang 30 Orang	Rp134,724,000
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Meningkatnya wawasan/pengetahuan PSKS, Masyarakat Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pembinaan LKKS, Pembinaan Orsos, Sosialisasi SLRT dan Puskesmas, Workshop UEP untuk Lembaga PSKS	379 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 50 Orang	Rp328,808,400

	3. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pendampingan Kasus, Sosialisasi Ilmu Psikologi untuk Menunjang Kegiatan LK3	379 orang 20 Orang 25 Orang	Rp13,627,800
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100.00%	Rp 10,230,349,857
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB Point	Rp 46,436,000
	Sub Kegiatan : Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (9 Dokumen)	1 NA	Rp 46,436,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Per Urusan	100%	Rp 8,209,711,805
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Kewajiban Pembayaran Jasa Asuransi ASN	14 Bulan	Rp 8,209,711,805
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100.00%	Rp 607,159,200
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	Rp 17,120,200
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cetakan dan Penggandaan	100.00%	Rp 262,990,000
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja SPPD Luar Daerah	100.00%	Rp 35,280,000
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja SPPD Luar Daerah	100.00%	Rp 291,769,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah.	85.00%	Rp 89,710,500
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel	Lain-lain Lemari dan Arsip Pejabat/Lemari Display, Pengadaan Kursi Pejabat, Pengadaan Meja Pejabat.	1 Unit 103 Buah 1 Paket	Rp 89,710,500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional perangkat daerah (100%)	100.00%	Rp 799,014,152
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air, Listrik, Surat Kabar, dan Telepon	2400m3 92500kwh 12 bulan	Rp 181,090,000
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor, Bahan Dekorasi, Bahan Komputer, Pengisian Tabung Gas, dan Peralatan Kebersihan	12 Bulan 28 meter 12 bulan 24 buah 12 bulan	Rp 75,712,600
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Asuransi Ketenagakerjaan & Kesehatan, Administrasi Perkantoran, Jasa Keamanan dan Tenaga Kebersihan, Jasa Pengemudi Honorarium Petugas Penginput Data, Honorarium PPK, PPTK, Staff PPTK, Tenaga Kontrak Kerja, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa.	12 Bulan 1 Paket 6 Bulan 12 Bulan 1 Paket	Rp 542,211,552
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	12 Bulan	Rp 478,318,200

Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1 Paket	Rp 21,000,000
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Aplikasi Server, Komputer/Laptop/note book, Printer, AC, videotron, service mobil, dan Terpeliharannya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung	12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 1 Paket 24 Unit 60 Unit 27 Unit	Rp 301,398,200
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung, Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	12 Bulan	Rp 155,920,000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KK Miskin (17%)	100%	Rp 2,404,678,600
5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknik PBI PD Pemda, Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Secara Akurat, Pengembangan Aplikasi SOLID, Penginputan Verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) pada Aplikasi SIKS-NG, Terlaksananya Rapat Evaluasi Program Sembako	5.78%	Rp 2,404,678,600

	Sub Kegiatan : 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan verval dan validasi BDT secara akurat, Pengembangan Aplikasi Sosial Integrasi Data Terpadu, Pengisian Data Prelist BDT dan Pengimputan Verval BDT pada Aplikasi SIKS-NG, Pengisian Data Prelist BDT pada Aplikasi SIKS-NG ASN dan NON ASN	2 Kegiatan 68 Peserta 74 Peserta	Rp518,384,400
	2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Langsung Tunai KPM, Biaya Penyaluran Kantor Pos, Honorarium PPBJ, Honorarium PPK, Terbinannya Pendampingan Sosial PKH, Terlaksananya Rakor Tikor Tingkat Kota Bogor, Terlaksananya Rapat Evaluasi BPNT Tingkat Kecamatan.	5600 KK 5600 KK 1 OB 1 OB 70 Orang 1 Kali 2 Kali	Rp1,857,017,800
	3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan, Bimbingan teknis, dan Pelatihan Keterampilan Bagi Fakir Miskin	77 Orang 50 Orang 50 Orang	Rp29,276,400
6	Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	86.42%	Rp 500,612,400
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana	100.00%	Rp 356,092,400
	Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang Terlayani, Jumlah Natura	2000 Jiwa 500 Paket	Rp 356,092,400

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya penanganan dan penanggulangan bencana oleh TAGANA	100.00%	Rp 144,520,000
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terfasilitasinya penanganan dan penanggulangan bencana oleh TAGANA	100.00%	Rp 144,520,000
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Lokasi Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara	100%	Rp 1,367,673,900
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	Rp 1,367,673,900
	Sub Kegiatan: 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Fasilitas Pemeliharaan TMP, Revitalisasi TMP Dreded	1061 Makam 1 TMP	Rp 1,300,000,000
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Fasilitas Pemeliharaan TMP, Terlaksananya Sosialisasi	1061 Makam 1 Kegiatan	Rp 67,673,900
	JUMLAH			Rp 15,494,345,557

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
	darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)								
16	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Lokasi	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	89	80	85	90	95	100	100
19	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	90	90	90	95	95	100	100
20	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
21	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	%	90	80	85	90	95	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020-2024 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan Kinerja Penyelenggaraan urusan Bidang Sosial dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kota Bogor **“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”** dan misi-misinya yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Perubahan Kota Bogor Tahun 2020-2024.

Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Daerah di Kota Bogor.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Sosial ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Bogor, oleh karena itu Renstra harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Sosial serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Pemerintah Kota Bogor. Harus dipastikan bahwa Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial Kota Bogor merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial atau target , kinerja dan sasaran Dinas Sosial Kota Bogor.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Sosial harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam laporan Kinerja Dinas Sosial dimasa yang akan datang.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2020-2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali kota melalui kepala Bappeda Kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kota Bogor mendapatkan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai Finalis Top Inovasi Jawa Barat tahun 2021 dengan Judul Inovasi Aplikasi SOLID (Sosial Integrasi Data) dalam mencapai target pendataan sesuai dengan data

yang telah diferifikasi dan tervalidasi oleh Tim SOLID pada Dinas Sosial Kota Bogor se Jawa Barat, selain itu juga Dinas Sosial mendapatkan Penghargaan Juara II pada acara Lomba Kebersihan antar Perangkat Daerah Se Kota Bogor dari Walikota Bogor. Dalam rangka berpartisipasi mensukseskan program Vaksinasi Pemerintah bagi Disabilitas, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan mengadakan Vaksinasi terhadap Disabilitas yang diinterfensi oleh Dinas Sosial.

Dinas Sosial kota bogor mengadakan Reward Juara Karyawan/karawati Terbaik dalam meraih Juara Karyawan Berdedikasi Sangat Tinggi Tahun 2021, meraih juara Terinofatif Tahun 2021, dan Karyawan Terdeisiplin terbaik pada karyawan Tahun 2021.

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

